



Peran Komunikasi Politik dalam Kampanye Isu Lingkungan: Studi Kasus pada Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Rangga Okta Budianto*, Lathifa Prima Ghanistyana

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi politik dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, mengingat pentingnya pengelolaan sampah dalam menghadapi tantangan lingkungan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu sampah dan keberlanjutan, komunikasi politik menjadi instrumen vital dalam menyebarkan informasi, mengubah sikap, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah. Namun, tantangan sosial, budaya, dan infrastruktur sering kali menghambat efektivitas kampanye ini, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai strategi komunikasi yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, regulasi terkait pengelolaan sampah, dan artikel media. Studi ini menganalisis berbagai strategi komunikasi politik yang digunakan oleh pemerintah dan aktor politik dalam mengampanyekan kebijakan pengelolaan sampah, serta mengevaluasi tantangan dan solusi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya infrastruktur. Kesimpulannya, keberhasilan kampanye komunikasi politik dalam pengelolaan sampah memerlukan strategi yang inklusif, berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai perubahan perilaku yang signifikan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Indonesia, Lingkungan, Komunikasi, Politik, Sampah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jbk.d.v2i1.3219>

*Correspondence: Rangga Okta Budianto

Email: orangga371@gmail.com

Received: 26-09-2024

Accepted: 15-10-2024

Published: 30-11-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze the role of political communication in waste management policy campaigns in Indonesia, given the importance of waste management in facing environmental challenges. In the midst of increasing attention to waste and sustainability issues, political communication has become a vital instrument in disseminating information, changing attitudes, and encouraging public participation in waste management policies. However, social, cultural and infrastructural challenges often hinder the effectiveness of these campaigns, so an in-depth analysis of the communication strategies that have been implemented is needed. This research uses a qualitative method with a literature study approach. Data were collected from various secondary sources, including scientific journals, government reports, regulations related to waste management, and media articles. This study analyzes the various political communication strategies used by the government and political actors in campaigning for waste management policies, and evaluates the challenges and solutions. The results show that political communication plays an important role in increasing public awareness and participation in waste management policies. However, its implementation faces obstacles such as low public awareness, weak law enforcement, and lack of infrastructure. In conclusion, the success of political communication campaigns in waste management requires an inclusive, sustainable strategy, as well as cross-sector collaboration between the government, private sector, and the community to achieve significant and sustainable behavior change.

Keywords: Indonesia, Environment, Communication, Politics, Waste

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menjadi topik yang semakin mendesak di berbagai belahan dunia. Salah satu masalah lingkungan yang menonjol adalah pengelolaan sampah. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi mengakibatkan produksi sampah yang terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia, masalah pengelolaan sampah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengingat banyaknya kota besar yang menghadapi krisis pengelolaan limbah, seperti banjir akibat tersumbatnya saluran air dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik yang sulit terurai. Dalam hal ini, peran komunikasi politik menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran publik serta menggerakkan perubahan perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah.

Komunikasi politik berkaitan dengan cara aktor-aktor politik, baik itu pemerintah, partai politik, maupun organisasi non-pemerintah (NGO), memobilisasi opini publik, memengaruhi sikap, dan mendorong tindakan dalam konteks isu-isu kebijakan. Dalam isu lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, komunikasi politik memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, serta membentuk opini publik terhadap masalah yang ada. Pemerintah dan aktor politik perlu menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk, sekaligus memperkenalkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, komunikasi politik dapat digunakan untuk membangun konsensus sosial yang lebih luas tentang pentingnya menjaga lingkungan serta mendorong penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif (Wolfsfeld, 2022).

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Namun, meskipun ada kebijakan tersebut, implementasinya seringkali masih mengalami berbagai kendala, baik dari segi infrastruktur, pendanaan, maupun rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini adalah efektivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, kebijakan pengelolaan sampah yang baik pun sulit untuk diterapkan dan diterima oleh masyarakat (Parameswari et al., 2024).

Kampanye komunikasi politik terkait pengelolaan sampah menjadi semakin relevan di era digital, di mana media sosial dan platform online lainnya menjadi sarana utama bagi pemerintah dan kelompok advokasi lingkungan untuk menyebarkan informasi. Penggunaan media sosial memungkinkan penyebaran pesan yang lebih luas, cepat, dan interaktif, sehingga dapat lebih efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, meskipun media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam kampanye politik, tantangan yang dihadapi adalah dalam mengelola arus informasi yang beragam, kadang kontradiktif, dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Studi kasus mengenai kampanye pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi politik dapat berjalan efektif jika melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta. Salah satu contoh yang cukup sukses adalah gerakan "Indonesia Bebas Sampah 2025", yang merupakan inisiatif nasional yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Gerakan ini tidak hanya melibatkan kampanye di media massa dan media sosial, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan, seperti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Kampanye ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia (Fadli & Sazali, 2023).

Namun, keberhasilan komunikasi politik dalam kampanye isu lingkungan seperti pengelolaan sampah juga sangat bergantung pada komitmen dan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Di Indonesia, salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait pembagian tanggung jawab dan alokasi sumber daya. Selain itu, sikap dan perilaku masyarakat terhadap sampah juga masih menjadi tantangan besar. Meski beberapa kelompok masyarakat telah menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya pengelolaan sampah, sebagian besar masyarakat masih belum disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya dan kurang paham akan pentingnya pemilahan sampah.

Komunikasi politik yang efektif harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan strategi yang tepat. Strategi tersebut harus mencakup edukasi yang berkelanjutan, pendekatan berbasis komunitas, serta kampanye yang kreatif dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, komunikasi politik juga harus mampu menjelaskan kebijakan secara jelas dan transparan, termasuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang manfaat jangka panjang dari pengelolaan sampah yang baik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menggerakkan perubahan sosial yang diperlukan untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran komunikasi politik dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, regulasi terkait pengelolaan sampah, artikel media, dan buku yang membahas komunikasi politik dan isu lingkungan. Melalui studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi politik yang digunakan pemerintah dan aktor-aktor politik memengaruhi penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur terkait, mengevaluasi efektivitas kampanye komunikasi politik, dan memahami tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran komunikasi politik dalam konteks kebijakan lingkungan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi Komunikasi Politik dalam Kampanye Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Komunikasi politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik, memengaruhi opini, dan mendorong tindakan terkait berbagai isu publik, termasuk isu lingkungan seperti pengelolaan sampah. Di Indonesia, masalah pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah, mengingat peningkatan produksi sampah yang terus terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah dan berbagai aktor politik menggunakan berbagai strategi komunikasi politik untuk menyampaikan kebijakan, menggalang dukungan publik, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah, strategi komunikasi politik tidak hanya melibatkan penggunaan media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, tetapi juga media digital yang semakin dominan dalam memengaruhi opini publik. Di samping itu, kampanye ini juga melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat itu sendiri (De Vries, 2020).

1. Penyebaran Pesan melalui Media Massa Tradisional

Pemerintah Indonesia secara aktif menggunakan media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar sebagai alat utama dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah. Media-media ini memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki akses terbatas terhadap internet. Kampanye yang dilakukan melalui media massa seringkali berupa iklan layanan masyarakat, berita, atau diskusi panel yang membahas isu-isu terkait sampah, seperti dampak lingkungan dari sampah plastik, pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan manfaat dari program daur ulang. Pesan-pesan yang disampaikan biasanya disesuaikan dengan karakteristik audiens, dengan fokus pada membangkitkan kesadaran akan masalah sampah serta menyoroti tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik (Wulandari et al., 2024).

2. Penggunaan Media Sosial dan Platform Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi salah satu saluran utama komunikasi politik di Indonesia. Pemerintah, politisi, dan aktivis lingkungan memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk menyampaikan pesan-pesan terkait kebijakan pengelolaan sampah. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, luas, dan interaktif, sehingga dapat menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang lebih aktif menggunakan platform digital.

Salah satu contoh sukses penggunaan media sosial dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia adalah kampanye "Indonesia Bebas Sampah 2025", sebuah gerakan nasional yang didukung oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Kampanye ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi

tentang pentingnya pengelolaan sampah, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih, dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, memberikan umpan balik, dan terlibat langsung dalam diskusi tentang isu sampah. Selain itu, media sosial memudahkan distribusi konten visual seperti gambar dan video, yang efektif dalam menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kampanye yang menggunakan visualisasi masalah lingkungan, seperti gambar sungai yang tercemar sampah atau video tentang proses daur ulang, sering kali lebih efektif dalam memicu emosi dan perhatian publik dibandingkan dengan teks atau narasi saja.

3. Pendekatan Berbasis Komunitas dan Partisipasi Masyarakat

Strategi komunikasi politik yang efektif dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia seringkali melibatkan pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengelolaan sampah, baik melalui kegiatan edukasi, pelatihan, maupun aksi nyata di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kebijakan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencari solusi bagi masalah sampah di lingkungan mereka.

Program seperti "Bank Sampah" adalah contoh nyata dari pendekatan berbasis komunitas yang berhasil. Dalam program ini, masyarakat diajak untuk mengumpulkan sampah rumah tangga, memisahkan sampah organik dan non-organik, serta menukarkan sampah yang dapat didaur ulang dengan sejumlah uang. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi langsung, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas seringkali melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal sebagai agen perubahan. Dalam komunikasi politik, tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat, karena mereka cenderung memiliki kredibilitas dan pengaruh yang lebih besar di mata warga lokal. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan dukungan publik yang lebih kuat terhadap kebijakan pengelolaan sampah (Tyas et al., 2024).

4. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Sektor Swasta

Dalam kampanye pengelolaan sampah di Indonesia, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan LSM dan sektor swasta menjadi salah satu strategi komunikasi politik yang penting dalam memperluas jangkauan kampanye dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. LSM seringkali memiliki jaringan yang kuat dengan komunitas lokal serta pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya di masyarakat, sehingga mereka dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai contoh, banyak LSM lingkungan di Indonesia yang fokus pada edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, seperti Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) yang berbasis di Bandung. LSM ini menjalankan berbagai program pelatihan dan pendampingan kepada komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang

pengurangan sampah dan daur ulang. Pemerintah dapat mendukung kegiatan ini dengan menyediakan regulasi yang mendukung serta sumber daya yang diperlukan untuk memperluas dampaknya.

Selain LSM, sektor swasta juga berperan dalam kampanye pengelolaan sampah, terutama dalam hal inovasi teknologi dan pengelolaan infrastruktur. Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah memulai program *corporate social responsibility* (CSR) yang berfokus pada pengelolaan sampah, seperti Unilever dan Danone. Perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam kampanye edukasi tentang pengelolaan sampah plastik, mendukung program daur ulang, serta mengembangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat membantu mempercepat implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta memperkenalkan solusi-solusi inovatif yang lebih berkelanjutan.

5. Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Berkelanjutan

Salah satu komponen kunci dari strategi komunikasi politik dalam kampanye pengelolaan sampah adalah peningkatan kapasitas masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan. Edukasi merupakan elemen penting dalam mendorong perubahan perilaku, karena banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik itu sekolah, media massa, media sosial, maupun melalui kegiatan-kegiatan komunitas.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif edukasi, seperti program "Sekolah Adiwiyata" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Program ini tidak hanya mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mendorong sekolah-sekolah untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik di lingkungan sekolah. Melalui program semacam ini, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang akan membawa dampak jangka panjang dalam pengelolaan sampah di masa depan (Theocharis & Jungherr, 2021).

Selain itu, pemerintah dan aktor politik juga dapat menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pedagang pasar, dan pelaku UMKM. Edukasi yang diberikan dapat mencakup topik-topik seperti pemilahan sampah, daur ulang, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Edukasi yang berkelanjutan ini diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku yang lebih luas dan mendalam di masyarakat.

6. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Strategi komunikasi politik dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah juga harus diiringi dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan dasar hukum bagi implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, tanpa penegakan hukum yang kuat, regulasi ini tidak akan efektif dalam mengubah perilaku masyarakat.

Sebagai bagian dari strategi komunikasi politik, pemerintah perlu memastikan bahwa pesan-pesan tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sampah disampaikan secara jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kampanye yang menekankan pentingnya mematuhi aturan, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau kewajiban memilah sampah di sumber, harus diiringi dengan penegakan sanksi yang tegas bagi pelanggar (Swarnawati et al., 2023).

B. Tantangan dalam Implementasi Komunikasi Politik Terkait Kampanye Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Solusi untuk Meningkatkan Dampaknya

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia telah menjadi prioritas dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan yang semakin meningkat, terutama seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu elemen penting dalam upaya tersebut adalah komunikasi politik, yaitu cara pemerintah dan aktor politik menyampaikan pesan, memengaruhi sikap, dan menggerakkan aksi masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi komunikasi politik dalam kampanye pengelolaan sampah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Tantangan-tantangan ini meliputi berbagai aspek, seperti hambatan sosial, budaya, politik, dan teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah pembahasan tentang tantangan-tantangan tersebut serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan dampak dari komunikasi politik terkait kampanye pengelolaan sampah di Indonesia (Stier et al., 2020).

1. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar dalam kampanye pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Meskipun beberapa kampanye komunikasi politik telah dilakukan, banyak orang masih belum menyadari dampak serius dari pengelolaan sampah yang buruk, seperti pencemaran lingkungan, risiko kesehatan, dan banjir akibat saluran air yang tersumbat sampah. Partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah juga masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemerintah perlu memprioritaskan edukasi publik secara berkelanjutan, terutama melalui program-program berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Pendekatan *bottom-up* ini memungkinkan masyarakat menjadi bagian aktif dalam merancang dan menjalankan program pengelolaan sampah, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap lingkungan mereka. Program seperti Bank Sampah, di mana masyarakat dapat menukarkan sampah dengan insentif ekonomi, merupakan contoh baik yang dapat diperluas ke seluruh negeri. Selain itu, edukasi lingkungan harus dimasukkan ke dalam

kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk membentuk generasi yang lebih sadar lingkungan (Papakyriakopoulos et al., 2020).

2. Tantangan Budaya dan Kebiasaan

Tantangan budaya juga memengaruhi keberhasilan kampanye komunikasi politik terkait pengelolaan sampah. Di banyak daerah di Indonesia, kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah mendarah daging, dan perilaku ini sulit diubah hanya melalui kampanye singkat. Kebiasaan membakar sampah, membuang sampah ke sungai, dan kurangnya pemisahan sampah organik dan non-organik merupakan contoh-contoh praktik yang masih banyak dilakukan (Dekoninck & Schmuck, 2022).

Mengubah kebiasaan dan norma budaya memerlukan pendekatan yang konsisten dan persuasif. Pemerintah dan aktor-aktor politik perlu menggunakan strategi pendekatan berbasis lokal yang memahami norma-norma dan adat setempat. Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan *influencer* lokal sebagai agen perubahan dapat membantu mengatasi resistensi budaya terhadap pengelolaan sampah yang lebih modern. Dalam hal ini, pendekatan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut dapat lebih efektif dibandingkan kampanye berbasis media yang lebih luas.

3. Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia adalah koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang dibuat di tingkat nasional sering kali tidak diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal karena adanya perbedaan prioritas, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya komunikasi yang efektif antara kedua tingkat pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kampanye pengelolaan sampah. Pemerintah pusat perlu menyediakan pedoman kebijakan yang jelas dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme dialog rutin antara pemerintah pusat dan daerah untuk berbagi informasi, evaluasi, dan pembelajaran dari pengalaman yang telah ada. Pemerintah pusat juga dapat memperkuat dukungannya terhadap pemerintah daerah melalui penyediaan anggaran, pelatihan teknis, dan pengawasan implementasi kebijakan. Sementara itu, pemerintah daerah perlu diberi keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, namun tetap dalam kerangka regulasi yang telah ditetapkan secara nasional (Nuraliza et al., 2024).

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Banyak daerah yang tidak memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai standar, fasilitas daur ulang, atau alat pemisah sampah. Hal ini membuat pengelolaan sampah di lapangan menjadi tidak efektif, meskipun kampanye komunikasi politik telah dilakukan.

Pemerintah perlu berinvestasi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Investasi ini

mencakup pembangunan fasilitas daur ulang, peningkatan kapasitas TPA, dan penyediaan sistem pemisahan sampah yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting untuk membawa inovasi teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah sampah. Misalnya, penggunaan teknologi *waste-to-energy* (pengolahan sampah menjadi energi) dapat menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi pengelolaan sampah atau mendukung pengembangan *start-up* yang berfokus pada inovasi lingkungan (Nasution & Sazali, 2024).

5. Kurangnya Penegakan Hukum dan Regulasi

Salah satu kendala yang sering ditemui dalam kampanye pengelolaan sampah adalah kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi terkait sampah. Meskipun Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur kewajiban masyarakat dan perusahaan dalam mengelola sampah, penerapan sanksi terhadap pelanggar sering kali tidak konsisten atau bahkan diabaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak merasa perlu untuk mematuhi regulasi tersebut.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparaturnya di lapangan untuk memastikan bahwa aturan terkait pengelolaan sampah dipatuhi. Misalnya, penerapan denda atau sanksi sosial bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan perlu diimplementasikan secara tegas, terutama di wilayah perkotaan yang lebih rawan terhadap masalah sampah. Selain itu, regulasi juga harus lebih diperkuat di tingkat lokal, misalnya melalui peraturan daerah (Perda) yang spesifik mengenai pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan relevan di tingkat lokal, diharapkan penerapannya akan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi setempat (Hapsari, 2024).

6. Penyebaran Misinformasi di Media Sosial

Media sosial telah menjadi saluran utama dalam komunikasi politik terkait pengelolaan sampah, terutama di kalangan generasi muda. Namun, salah satu tantangan besar yang muncul dari penggunaan media sosial adalah penyebaran misinformasi atau berita bohong terkait isu lingkungan. Misinformasi ini dapat mengurangi efektivitas kampanye pengelolaan sampah, karena masyarakat mungkin menjadi skeptis terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau aktor-aktor lingkungan.

Untuk mengatasi penyebaran misinformasi, pemerintah dan aktor politik harus lebih proaktif dalam mengelola informasi di media sosial. Salah satu solusinya adalah dengan bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten-konten yang salah atau menyesatkan terkait isu pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pesan-pesan resmi terkait kebijakan pengelolaan sampah disebarluaskan secara konsisten dan transparan melalui akun resmi pemerintah dan lembaga terkait. Kampanye yang melibatkan *influencer* atau tokoh publik yang memiliki kredibilitas tinggi juga dapat membantu melawan misinformasi dan menyebarkan

informasi yang akurat secara lebih efektif. *Influencer* ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah (Farkas & Bene, 2021).

7. Minimnya Insentif Ekonomi untuk Daur Ulang

Salah satu alasan mengapa pengelolaan sampah belum optimal adalah kurangnya insentif ekonomi bagi masyarakat untuk terlibat dalam program daur ulang. Masyarakat sering kali merasa bahwa usaha untuk memilah sampah atau mengelola sampah dengan baik tidak memberikan manfaat ekonomi langsung, sehingga partisipasi dalam program-program daur ulang tetap rendah.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam daur ulang, pemerintah dapat memperkenalkan insentif ekonomi yang lebih jelas dan menarik. Misalnya, program Bank Sampah yang memberikan imbalan ekonomi bagi masyarakat yang mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang perlu diperluas ke seluruh negeri. Pemerintah juga dapat mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk daur ulang, sehingga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam rantai pasokan daur ulang. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi bagi perusahaan yang terlibat dalam industri daur ulang, sehingga mendorong lebih banyak investasi dalam teknologi pengelolaan sampah dan daur ulang (Fadli & Sazali, 2023).

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik memainkan peran krusial dalam kampanye kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Melalui komunikasi politik yang efektif, pemerintah dan aktor-aktor politik dapat menggerakkan masyarakat, menciptakan kesadaran lingkungan, dan mendorong partisipasi dalam program-program pengelolaan sampah. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, hambatan budaya, kurangnya infrastruktur, dan lemahnya penegakan hukum, seringkali menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif, berbasis partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk mencapai hasil yang lebih signifikan.

Lebih lanjut, keberhasilan kampanye komunikasi politik dalam isu pengelolaan sampah juga memerlukan konsistensi dan keberlanjutan. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang dapat menyesuaikan dengan konteks lokal, menggunakan media yang tepat, serta melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sebagai agen perubahan. Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas, disertai dengan insentif ekonomi bagi masyarakat, akan memperkuat efektivitas komunikasi politik dan mendorong perubahan perilaku dalam jangka panjang. Dengan pendekatan holistik dan terkoordinasi, komunikasi politik dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- De Vries, G. (2020). Public communication as a tool to implement environmental policies. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 244-272.
- Dekoninck, H., & Schmuck, D. (2022). The mobilizing power of influencers for pro-environmental behavior intentions and political participation. *Environmental Communication*, 16(4), 458-472.
- Fadli, A., & Sazali, H. (2023). Peran Media Sosial Instagram@ GREENPEACEID Sebagai Media Kampanye dalam Menjaga Lingkungan. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(2), 209-222.
- Farkas, X., & Bene, M. (2021). Images, politicians, and social media: Patterns and effects of politicians' image-based political communication strategies on social media. *The international journal of press/politics*, 26(1), 119-142.
- Hapsari, M. I. (2024). Taktik Komunikasi Efektif dalam Kampanye Lingkungan: Peran Humas dalam Kesadaran dan Aksi Bersama. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 151-157.
- Nasution, M. S., & Sazali, H. (2024). Peran Komunikasi dalam Membangun Keberlanjutan dan Ketahanan Lingkungan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(9), 3984-4000.
- Nuraliza, V., Rahmadi, A. N., Mubaroq, A., Kristiyono, K., Melani, A. P., & Ifana, A. (2024). Peran komunikasi politik dalam membentuk opini publik menghadapi Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 245-261.
- Papakyriakopoulos, O., Serrano, J. C. M., & Hegelich, S. (2020). Political communication on social media: A tale of hyperactive users and bias in recommender systems. *Online Social Networks and Media*, 15, 100058.
- Parameswari, D. M., Qoni'ah Nur Wijayanti, S. I., & Ikom, M. (2024). Strategi Komunikasi Digital Partai Pan Dalam Membangun Kampanye Dengan Memanfaatkan Media Sosial. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
- Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2020). Election campaigning on social media: Politicians, audiences, and the mediation of political communication on Facebook and Twitter. In *Studying politics across media* (pp. 50-74). Routledge.
- Swarnawati, A., Yuningsih, S., Purnamasari, O., & Nurhayati, E. S. (2023). Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Kampanye Minim Sampah. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 7(1), 77-88.
- Theocharis, Y., & Jungherr, A. (2021). Computational social science and the study of political communication. *Political Communication*, 38(1-2), 1-22.
- Tyas, S. P., Azzahra, N., Ifada, B. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Peran Komunikasi Persuasif Dalam Media Sosial. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 16-22.
- Wolfsfeld, G. (2022). *Making sense of media and politics: Five principles in political communication*. Routledge.
- Wulandari, Y. F., Bastian, Y., Murtiadi, M., & Afianto, H. (2024). Strategi Komunikasi Pemkot Depok Dalam Kampanye 3R Melalui Bank Sampah Menuju Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1773-1788.